



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22 / 02437

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, serta untuk melindungi informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang – undangan, dipandang perlu menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak atas setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Informasi Yang Dikecualikan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4291);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

- 2 -

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN**
KESATU : Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Pelayanan informasi publik selain informasi yang dikecualikan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 12 Maret 2021

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWATENGAH**

Sekretaris



Drs. EKO SUPRAYITNO, MM

LAMPIRAN I : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 487.22 / 02437
Tanggal : 12 Maret 2021

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI


Pada hari ini, Jumat tanggal 12 bulan Maret tahun 2021 bertempat di Ruang Rapat I Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah :

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
1.	Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbatas (Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang PNS diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS
3.	Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin dan/atau PNS yang diduga melanggar disiplin memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi : - Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
4.	SK dan Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang PNS yang dijatuhi Hukuman disiplin memberikan Persetujuan Tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	SK dan Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Setelah terbitnya Surat Ijin Perceraian/Keterangan Perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Data hasil check up/Rekam Medik PNS yang mengikuti Pengujian Kesehatan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan Dinas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7.	Data hasil tes potensi perorangan ASN	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
8.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
9.	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
10.	Berkas/ Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
11.	Daftar rencana penempatan CPNS/ PNS serta Penempatan Jabatan Struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK dan Pelantikan dalam Jabatan	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi

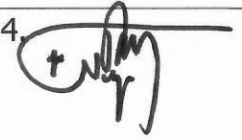

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
12.	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi
13.	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Prov/Kab/Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi
14.	Hasil Penilaian Manajerial dan sosio Kultural ASN Struktural Provinsi/Kab/Kota - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
15.	Data Nilai peserta ujian Prov/Kab/Kota - CPNS - Ujian Dinas - Ujian KPPI - Ujian - Penggunaan Gelar	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pengumuman (Terbuka khusus data pribadi yang bersangkutan)	- Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
16.	Data Presensi PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Terbuka untuk administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kedinasan kecuali data yang bersifat rahasia dan atau belum final terkalkulasi	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi Hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
17.	Formasi CPNS	UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN	Terbuka setelah Pengumuman CPNS oleh Kementerian PAN &RB dan BKN	Menimbulkan keresahan	Melindungi Institusi Pendidikan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Drs. Eko Suprayitno, MM	Sekretaris	Sekretariat	1. 
2.	Wahyu Prasetyo Adi, S.Pi, M.Si	Kasubag Program	Sekretariat	2. 
3.	Deasy Rina Wijayanti , SE, MSi	Kasubag Keuangan	Sekretariat	3. 
4.	Aminurdin, S.STP	Kasubag Umpeg	Sekretariat	4. 
5.	Ary Widiyantoro, SSTP	Kabid Bidang Perenc dan Pengembangan Pegawai	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	5. 
6.	Muharyo Indro Yulianto, S.Kom, M.Ak	Kasubid Formasi dan Pengembangan	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	6. 

7. Agil Joko 7

7.	Agil Joko Sarjono, SH, MH	Kasubid Pembinaan	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	7. 
8.	Agung Raharjo Wibowo Kusumo, SE, MM	Kesejahteraan Pegawai	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	8. 
9.	Kristiawan Nurdianto, SKom, M.Kom	Kasubid Pengelola Data Kepegawian	Bidang Informasi Kepegawaian	9. 
10.	Oky Juned Cahyonugroho, S.STP, M.Si	Kasubid Pengangkatan	Bidang Mutasi	10. 
11.	ZM. Sri Sumaryanti, S.Sos	Kasi Penilaian Kompetensi	Unit Penilai Kompetensi ASN	11. 
12.	Budidojo Oetomo, S.Kom	Staf Umpeg	Sekretariat	12. 
13.	Danang Tri Hermawan	Staf Program	Sekretariat	13. 

14.	Wahyu Gunadi Saputro, S.STP, M.Si	Staf Umpeg	Sekretariat	14. 
15.	Johan Apri Wibowo, S.Sos	Staf Subbid Pembinaan	Bidang PKP	15. 

Mengetahui,
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. WISNU ZAROH, M.Si